

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem demokrasi menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam kehidupan bernegara. Dalam sistem tersebut, masyarakat memiliki hak untuk terlibat dalam menentukan arah pemerintahan melalui mekanisme pemilihan umum. Pemilihan Umum atau Pemilu menjadi salah satu sarana utama bagi warga negara untuk menyalurkan aspirasi politiknya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Oleh karena itu, Pemilu tidak hanya dipahami sebagai mekanisme pergantian kekuasaan, tetapi juga sebagai indikator penting dalam melihat kualitas partisipasi politik masyarakat dalam sistem demokrasi (Hidayat, 2025; Liando, 2016).

Salah satu bentuk pelaksanaan demokrasi di tingkat lokal adalah Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada. Pilkada memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih gubernur, bupati, dan wali kota secara langsung sesuai dengan kebutuhan dan dinamika daerahnya. Berbeda dengan Pemilu nasional, Pilkada memiliki kedekatan yang lebih kuat dengan kondisi sosial, ekonomi, budaya, serta relasi politik masyarakat lokal. Dengan demikian, tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada menjadi penting karena berhubungan dengan legitimasi kepala daerah terpilih dan kualitas demokrasi lokal (Saiin, 2020).

Partisipasi politik masyarakat menjadi aspek penting dalam penyelenggaraan Pemilu maupun Pilkada. Dalam sistem demokrasi perwakilan, keterlibatan warga

negara dalam bentuk pemberian suara atau voting merupakan wujud nyata dari kedaulatan rakyat. Tingginya partisipasi politik menunjukkan adanya kesadaran masyarakat untuk terlibat dalam proses politik, sedangkan rendahnya partisipasi dapat menunjukkan adanya apatisme, kurangnya kepercayaan terhadap sistem politik, atau rendahnya kesadaran politik. Partisipasi politik juga tidak hanya berkaitan dengan jumlah pemilih yang hadir di Tempat Pemungutan Suara, tetapi juga berkaitan dengan kualitas keterlibatan masyarakat dalam memahami dan menentukan pilihan politiknya (Warganegara et al., 2019; Setiawan & Djafar, 2023).

Dalam konteks Pilkada Kota Semarang Tahun 2024, partisipasi politik masyarakat menunjukkan dinamika yang menarik untuk dikaji. Data Pilkada Serentak 2024 di Kecamatan Semarang Tengah menunjukkan bahwa sebanyak 29.815 dari 48.183 pemilih menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Wali Kota Semarang, dengan persentase 65,99%. Sementara itu, dalam Pemilihan Gubernur Jawa Tengah, sebanyak 29.963 pemilih menggunakan hak pilihnya dari total 48.183 pemilih, dengan persentase 66,31%. Data tersebut menunjukkan bahwa secara umum partisipasi pemilih di Kecamatan Semarang Tengah tergolong cukup tinggi, tetapi masih terdapat variasi pada tingkat kelurahan.

Tabel 1. 1 Tingkat Partisipasi Pemilih Pilkada Serentak 2024 Kecamatan Semarang Tengah

No	Jenis Pemilihan	Jumlah Pemilih	Pengguna Hak Pilih	Persentase (%)
1	Pemilihan Wali Kota	48.183	29.815	65,99
2	Pemilihan Gubernur Jawa Tengah	48.183	29.963	66,31

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2026

Berdasarkan Tabel 1.1, terlihat bahwa tingkat partisipasi pemilih di Kecamatan Semarang Tengah tergolong cukup tinggi, baik pada pemilihan Wali Kota maupun Gubernur. Namun demikian, tingkat partisipasi tersebut belum merata dan masih menunjukkan adanya variasi di tingkat kelurahan, sehingga diperlukan analisis lebih lanjut pada tingkat wilayah yang lebih spesifik.

Tabel 1. 2 Tingkat Partisipasi Pemilih Antar Kelurahan di Kecamatan Semarang Tengah Tahun 2024

No	Kelurahan	Pilwalkot (%)	Pilgub (%)	Keterangan
1	Pandansari	70,57	72,76	Tinggi
2	Pindrikan Lor	70,05	70,05	Tinggi
3	Kauman	68,35	68,35	Tinggi
4	Pindrikan Kidul	67,68	72,76	Tinggi
5	Kembang Sari	60,23	60,71	Rendah
6	Kranggan	61,96	61,96	Sedang

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2026

Variasi partisipasi tersebut terlihat dari perbedaan tingkat partisipasi antar kelurahan di Kecamatan Semarang Tengah. Kelurahan Pandansari mencatat tingkat partisipasi Pilwalkot sebesar 70,57%, Pindrikan Lor sebesar 70,05%, dan Kauman sebesar 68,35%. Sementara itu, dalam Pilgub, Kelurahan Pindrikan Kidul mencapai tingkat partisipasi sebesar 72,76%, sedangkan Kembang Sari berada pada angka 60,71%. Kelurahan Kranggan sendiri mencatat tingkat partisipasi sebesar 61,96% dalam Pilwalkot maupun Pilgub, sehingga berada di bawah beberapa kelurahan lain yang memiliki tingkat partisipasi lebih tinggi.

Meskipun Kelurahan Kembang Sari memiliki tingkat partisipasi pemilih yang lebih rendah dibandingkan Kelurahan Kranggan, pemilihan lokasi dalam penelitian ini tidak hanya didasarkan pada angka partisipasi terendah. Penelitian ini sejak awal tidak diarahkan untuk membandingkan kelurahan dengan tingkat partisipasi rendah,

melainkan untuk memahami partisipasi politik masyarakat Tionghoa dalam ruang sosial tertentu. Oleh karena itu, lokasi penelitian perlu dipilih berdasarkan kesesuaian antara data partisipasi politik dengan keberadaan masyarakat Tionghoa sebagai subjek utama penelitian.

Kelurahan Kranggan menjadi relevan karena berada dalam kawasan Pecinan Semarang dan memiliki hubungan historis dengan keberadaan masyarakat Tionghoa di Kota Semarang. Namun, Kranggan sebagai wilayah kelurahan masih terlalu luas dan memiliki karakter masyarakat yang beragam. Jika penelitian dilakukan pada Kranggan secara umum, fokus kajian dikhawatirkan menjadi terlalu melebar dan tidak sepenuhnya menggambarkan dinamika masyarakat Tionghoa yang menjadi pusat perhatian penelitian ini.

Gang Pinggir memiliki keterkaitan yang kuat dengan fokus penelitian karena berada di Kelurahan Kranggan, salah satu wilayah yang termasuk dalam kawasan Pecinan Semarang. Berdasarkan data Kecamatan Semarang Tengah Dalam Angka 2024, jumlah penduduk Kelurahan Kranggan tercatat sebanyak 3.749 jiwa. Data tersebut belum memuat komposisi penduduk berdasarkan etnis, sehingga persentase masyarakat Cina/Tionghoa di Gang Pinggir belum dapat disebutkan secara pasti. Namun, data sosial-keagamaan menunjukkan bahwa Kelurahan Kranggan memiliki 587 penduduk beragama Buddha dan 6 vihara, yang merupakan jumlah vihara terbanyak dibandingkan kelurahan lain di Kecamatan Semarang Tengah. Meskipun data agama tidak dapat disamakan secara langsung dengan data etnis, informasi tersebut dapat digunakan sebagai petunjuk pendukung bahwa Kranggan memiliki hubungan yang erat dengan kehidupan sosial-keagamaan

masyarakat Tionghoa.

Keterkaitan Gang Pinggir dengan masyarakat Tionghoa juga dapat dilihat dari karakter kawasan Pecinan Semarang itu sendiri. Saputra dan Wijayati (2024) menjelaskan bahwa Pecinan Semarang tidak hanya berfungsi sebagai ruang sosial, tetapi juga sebagai ruang ekonomi dan budaya bagi masyarakat Tionghoa. Aktivitas perdagangan melalui gang, keberadaan toko-toko di sepanjang jalan, serta kegiatan budaya seperti perayaan Imlek dan pertunjukan barongsai menunjukkan bahwa kawasan ini masih memiliki identitas Tionghoa yang kuat. Dengan demikian, meskipun data persentase etnis Tionghoa di Gang Pinggir belum tersedia secara terbuka, pemilihan wilayah ini tetap relevan karena didukung oleh data sosial-keagamaan Kelurahan Kranggan serta karakter historis, ekonomi, dan budaya kawasan Pecinan Semarang.

Kelurahan Kranggan menjadi penting untuk dikaji karena di dalamnya terdapat Gang Pinggir yang merupakan bagian dari kawasan Pecinan Kota Semarang. Gang Pinggir tidak hanya dapat dipahami sebagai wilayah administratif, tetapi juga sebagai ruang sosial dan ekonomi yang memiliki hubungan historis dengan masyarakat Tionghoa. Kawasan ini dikenal sebagai salah satu pusat permukiman dan aktivitas masyarakat Tionghoa yang berada dekat dengan pusat perdagangan serta pemerintahan kota. Oleh karena itu, pemilihan Gang Pinggir sebagai lokasi penelitian perlu dipahami melalui hubungan antara wilayah, komunitas Tionghoa, dan dinamika partisipasi politik lokal.

Masyarakat Tionghoa di Gang Pinggir memiliki posisi yang menarik dalam kajian partisipasi politik. Di satu sisi, masyarakat Tionghoa dikenal memiliki peran

kuat dalam aktivitas sosial dan ekonomi, terutama dalam perdagangan dan kehidupan komunitas di kawasan Pecinan. Namun di sisi lain, partisipasi politik mereka dalam Pilkada masih perlu dikaji lebih mendalam, terutama karena tingkat partisipasi di Kelurahan Kranggan hanya mencapai 61,96%. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan ideal bahwa setiap warga negara berpartisipasi aktif dalam demokrasi dengan kenyataan bahwa partisipasi politik di wilayah tersebut belum sepenuhnya optimal.

Permasalahan partisipasi politik masyarakat Tionghoa di Gang Pinggir tidak dapat dipahami hanya melalui angka partisipasi pemilih. Data partisipasi memang menunjukkan tingkat kehadiran masyarakat dalam menggunakan hak pilih, tetapi belum menjelaskan secara mendalam bagaimana bentuk keterlibatan politik masyarakat dan faktor-faktor yang melatarbelakanginya. Oleh karena itu, partisipasi politik masyarakat Tionghoa di Gang Pinggir perlu dianalisis melalui berbagai aspek, seperti kesadaran politik, akses informasi, kepercayaan terhadap penyelenggara pemilu, pengalaman historis, aktivitas sosial-ekonomi, serta lingkungan politik masyarakat setempat. Dengan demikian, penelitian ini tidak diarahkan untuk membahas pelaksanaan Pilkada Kota Semarang Tahun 2024 secara umum, melainkan difokuskan pada bentuk partisipasi politik masyarakat Tionghoa di Gang Pinggir serta faktor-faktor yang memengaruhinya.

Kajian mengenai partisipasi politik masyarakat Tionghoa telah dilakukan dalam beberapa penelitian sebelumnya. Perangin-angin dan Zainal (2018) menunjukkan bahwa partisipasi politik pemilih pemula masih rendah meskipun media sosial memberi ruang informasi politik yang lebih luas. Anugrah dan

Syawaluddin (2021) menemukan bahwa partisipasi politik etnis Tionghoa di Palembang cenderung bersifat individual dan pasif. Sementara itu, Zamhasari (2024) menekankan bahwa keterlibatan aktif masyarakat dalam Pilkada merupakan salah satu indikator demokrasi yang sehat.

Penelitian lain juga menunjukkan bahwa identitas etnis dan konteks sosial memiliki keterkaitan dengan dinamika partisipasi masyarakat. Amika, Sukmana, dan Susilo (2024) menjelaskan bahwa kelompok etnis minoritas memiliki peran penting dalam demokrasi, tetapi juga menghadapi berbagai tantangan dalam ruang politik. Sibawati (2024) menyoroti pengalaman historis diskriminasi terhadap masyarakat Tionghoa yang dapat memengaruhi posisi sosial dan politik mereka. Rochana, Kartidjo, dan Irnawan (2024) juga menunjukkan bahwa kawasan Pecinan Semarang memiliki nilai historis dan identitas lokal yang kuat dalam kehidupan sosial masyarakat.

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, partisipasi politik masyarakat Tionghoa tidak dapat disamaratakan di setiap daerah. Meskipun penelitian Anugrah dan Syawaluddin (2021) menunjukkan bahwa etnis Tionghoa cenderung individual dan pasif, kondisi masyarakat Tionghoa di Gang Pinggir perlu dikaji secara khusus karena berada dalam kawasan Pecinan Semarang yang memiliki sejarah, aktivitas ekonomi, dan kehidupan sosial yang khas. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk melihat bagaimana bentuk partisipasi politik masyarakat Tionghoa di Gang Pinggir dalam Pilkada Kota Semarang Tahun 2024.

Berdasarkan penelitian yang dipaparkan di atas, masih terdapat ruang kajian yang perlu dikembangkan. Penelitian sebelumnya telah membahas partisipasi

politik, etnis Tionghoa, politik identitas, dan kawasan Pecinan, tetapi belum banyak yang secara khusus mengkaji partisipasi politik masyarakat Tionghoa di Gang Pinggir dalam konteks Pilkada Kota Semarang Tahun 2024. Gang Pinggir menjadi penting karena berada dalam kawasan Pecinan Semarang, memiliki sejarah sebagai ruang aktivitas masyarakat Tionghoa, serta berada di Kelurahan Kranggan yang tingkat partisipasi pemilihnya belum optimal. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan kajian tersebut dengan menganalisis bentuk partisipasi politik masyarakat Tionghoa di Gang Pinggir serta faktor-faktor yang memengaruhinya.

Penelitian ini menjadi penting karena partisipasi politik masyarakat Tionghoa di Gang Pinggir tidak hanya berkaitan dengan penggunaan hak pilih, tetapi juga dengan posisi kelompok minoritas dalam demokrasi lokal. Melalui penelitian ini, dapat dilihat apakah masyarakat Tionghoa di Gang Pinggir hanya berpartisipasi dalam bentuk voting atau juga terlibat dalam bentuk partisipasi politik lainnya. Selain itu, penelitian ini juga berupaya melihat apakah identitas etnis, lingkungan sosial, akses informasi, dan kepercayaan terhadap penyelenggara pemilu berpengaruh terhadap keterlibatan politik mereka.

Masyarakat Tionghoa di Gang Pinggir memiliki karakter yang berbeda dengan masyarakat Tionghoa di kawasan perumahan modern atau wilayah lain di Kota Semarang. Perbedaan tersebut terlihat dari posisi Gang Pinggir sebagai bagian dari kawasan Pecinan lama yang sejak lama berkembang sebagai ruang permukiman, perdagangan, dan aktivitas sosial-budaya masyarakat Tionghoa. Kondisi ini membuat kehidupan masyarakat Tionghoa di Gang Pinggir lebih dekat

dengan dinamika ekonomi kawasan, interaksi sosial lintas etnis, serta identitas historis Pecinan Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai partisipasi politik masyarakat Tionghoa di Gang Pinggir dalam Pilkada Kota Semarang Tahun 2024.

Berdasarkan uraian tersebut, fokus penelitian ini adalah menganalisis partisipasi politik masyarakat Tionghoa di Gang Pinggir dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Semarang Tahun 2024. Penelitian ini diarahkan untuk menjelaskan bentuk partisipasi politik masyarakat, baik dalam penggunaan hak pilih maupun keterlibatan politik lainnya. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi politik masyarakat Tionghoa di Gang Pinggir. Dengan fokus tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kajian partisipasi politik kelompok minoritas dalam konteks demokrasi lokal.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk partisipasi politik masyarakat Tionghoa di Gang Pinggir dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Semarang tahun 2024?
2. Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi partisipasi politik masyarakat Tionghoa di Gang Pinggir dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Semarang Tahun 2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah dan latar belakang di atas, memiliki beberapa tujuan penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Menganalisis bentuk partisipasi politik masyarakat Tionghoa di Gang Pinggir dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Semarang Tahun 2024.
2. Menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi politik masyarakat Tionghoa di Gang Pinggir dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Semarang Tahun 2024.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, baik secara teoritis maupun praktis:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam kajian ilmu politik, dengan menambah pemahaman tentang partisipasi politik kelompok minoritas etnis di tingkat lokal, terutama dalam hal ini di Gang Pinggir Semarang. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi akademik bagi studi-studi selanjutnya yang membahas keterlibatan politik masyarakat Tionghoa atau kelompok minoritas lainnya dalam kaitannya dengan pemilihan kepala daerah.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah, penyelenggara pemilu, serta aktor-aktor politik untuk

menyusun strategi pendekatan yang lebih inklusif dan efektif dalam meningkatkan partisipasi politik kelompok minoritas, khususnya masyarakat Tionghoa. Penelitian ini juga diharapkan dapat membuka ruang dialog dan kesadaran di kalangan masyarakat Tionghoa sendiri mengenai pentingnya keterlibatan aktif dalam proses demokrasi lokal sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan daerah.

1.5 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian Kajian mengenai masyarakat Tionghoa dan keterlibatannya dalam politik telah dilakukan dalam beberapa penelitian sebelumnya. Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa perilaku politik masyarakat Tionghoa tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial, historis, keagamaan, identitas, dan wilayah tempat mereka berada. Oleh karena itu, penelitian terdahulu digunakan untuk melihat posisi penelitian ini, terutama dalam membedakan fokus kajian, lokasi penelitian, dan kebaruan yang ditawarkan.

Penelitian yang paling dekat dengan penelitian ini adalah penelitian Triko Wijayanto (2020) yang berjudul “Perilaku Memilih Etnis Tionghoa di Kelurahan Kranggan Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah dalam Pilpres Tahun 2019”. Penelitian tersebut membahas perilaku memilih masyarakat Tionghoa di Kelurahan Kranggan dalam konteks Pilpres 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku memilih masyarakat Tionghoa di Kelurahan Kranggan banyak dipengaruhi oleh pendekatan psikologis dan pendekatan rasional. Pendekatan psikologis terlihat dari kedekatan emosional responden dengan partai tertentu, sedangkan pendekatan rasional terlihat dari pertimbangan responden terhadap program kandidat. Penelitian tersebut memiliki

relevansi yang kuat karena sama-sama membahas masyarakat Tionghoa di Kelurahan Kranggan. Namun, penelitian Triko berfokus pada perilaku memilih dalam Pilpres 2019 dengan pendekatan kuantitatif, sedangkan penelitian ini berfokus pada partisipasi politik masyarakat Tionghoa di Gang Pinggir dalam Pilkada Kota Semarang Tahun 2024 dengan pendekatan kualitatif.

Penelitian lain yang relevan dilakukan oleh Muhammad Yoga Anugrah dan M. Syawaluddin (2021) dengan judul “Politik Identitas: Peran Politik Etnis Tionghoa dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2018”. Penelitian tersebut membahas keterlibatan politik etnis Tionghoa melalui organisasi PITI atau Persatuan Islam Tionghoa Indonesia. Simpulan penelitian tersebut menunjukkan bahwa partisipasi politik anggota PITI cenderung bersifat individual, netral, dan pasif. Organisasi tidak secara langsung mengarahkan pilihan politik anggotanya, sehingga keterlibatan politik lebih banyak ditentukan oleh pertimbangan pribadi. Penelitian ini relevan karena sama-sama membahas etnis Tionghoa dalam konteks pemilihan kepala daerah. Akan tetapi, penelitian Anugrah dan Syawaluddin menempatkan organisasi keagamaan-etnis sebagai fokus kajian, sedangkan penelitian ini berfokus pada masyarakat Tionghoa di Gang Pinggir sebagai bagian dari kawasan Pecinan Semarang.

Kajian mengenai pengalaman historis etnis Tionghoa dibahas oleh Ihzanda Sibawati (2024) dalam penelitian berjudul “Eksistensi Etnis Cina di Bawah Pemerintahan Orde Baru, 1966–1998”. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa etnis Cina/Tionghoa mengalami berbagai bentuk pembatasan pada masa Orde Baru, baik dalam ekspresi budaya, sosial, maupun politik. Simpulan penelitian tersebut

menunjukkan bahwa pengalaman diskriminasi pada masa Orde Baru turut membentuk posisi sosial masyarakat Tionghoa dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Penelitian ini relevan karena membantu menjelaskan latar historis masyarakat Tionghoa sebagai kelompok minoritas. Namun, penelitian Sibawati lebih berfokus pada dinamika historis etnis Tionghoa pada masa Orde Baru, sedangkan penelitian ini mengkaji partisipasi politik masyarakat Tionghoa dalam konteks demokrasi lokal pasca-reformasi, khususnya pada Pilkada Kota Semarang Tahun 2024.

Penelitian tentang kawasan Pecinan Semarang dilakukan oleh Intan Pramesti Rochana, Woerjantari Kartidjo, dan Dody Irnawan (2024) dengan judul “Menggali Karakteristik Pecinan dalam Menjaga Nilai-Nilai Signifikansi Kawasan Cagar Budaya”. Penelitian tersebut membahas karakteristik kawasan Pecinan Semarang sebagai kawasan yang memiliki nilai historis, budaya, arsitektur, dan identitas lokal. Simpulan penelitian tersebut menunjukkan bahwa Pecinan Semarang tidak hanya memiliki fungsi sebagai ruang fisik, tetapi juga menjadi ruang yang menyimpan nilai sosial dan budaya masyarakat Tionghoa. Penelitian ini penting sebagai dasar untuk memahami Gang Pinggir sebagai bagian dari kawasan Pecinan. Akan tetapi, penelitian Rochana, Kartidjo, dan Irnawan lebih menekankan pada pelestarian kawasan cagar budaya, bukan pada partisipasi politik masyarakat Tionghoa dalam pemilihan kepala daerah.

Penelitian Saputra dan Wijayati (2024) juga relevan karena membahas Pecinan Semarang sebagai ruang sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat Tionghoa. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa aktivitas perdagangan melalui

gang dan toko-toko di sepanjang kawasan Pecinan memperlihatkan fungsi ekonomi yang kuat. Sementara itu, kegiatan budaya seperti perayaan Imlek dan pertunjukan barongsai menunjukkan bahwa kawasan Pecinan masih memiliki peran penting dalam menjaga identitas budaya masyarakat Tionghoa. Simpulan penelitian tersebut memperkuat pemahaman bahwa Pecinan Semarang merupakan ruang sosial yang hidup, bukan hanya kawasan peninggalan sejarah. Namun, penelitian Saputra dan Wijayati belum membahas keterlibatan politik masyarakat Tionghoa, sehingga masih terdapat ruang untuk mengkaji bagaimana masyarakat Tionghoa di kawasan Pecinan berpartisipasi dalam Pilkada.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut, dapat dilihat bahwa kajian mengenai masyarakat Tionghoa telah dilakukan dari berbagai sudut pandang. Penelitian Triko Wijayanto membahas perilaku memilih etnis Tionghoa di Kelurahan Kranggan dalam Pilpres 2019. Penelitian Anugrah dan Syawaluddin membahas partisipasi politik etnis Tionghoa melalui organisasi keagamaan PITI dalam Pilkada Palembang. Penelitian Sibawati menjelaskan pengalaman historis etnis Tionghoa pada masa Orde Baru. Sementara itu, penelitian Rochana, Kartidjo, dan Irnawan serta Saputra dan Wijayati membahas Pecinan Semarang sebagai ruang sosial, budaya, ekonomi, dan historis masyarakat Tionghoa.

Jika dibandingkan dengan penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini memiliki posisi yang berbeda. Penelitian ini tidak hanya membahas perilaku memilih seperti penelitian Triko, tidak hanya membahas organisasi etnis-keagamaan seperti penelitian Anugrah dan Syawaluddin, dan tidak hanya membahas Pecinan sebagai kawasan sosial-budaya seperti penelitian Rochana,

Kartidjo, Irnawan serta Saputra dan Wijayati. Penelitian ini secara khusus mengkaji partisipasi politik masyarakat Tionghoa di Gang Pinggir dalam Pilkada Kota Semarang Tahun 2024. Fokus penelitian diarahkan pada bentuk partisipasi politik masyarakat serta faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi tersebut.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut, penelitian ini memiliki posisi yang berbeda. Penelitian Triko Wijayanto memang sudah membahas masyarakat Tionghoa di Kelurahan Kranggan, tetapi fokusnya berada pada perilaku memilih dalam Pilpres 2019 dengan pendekatan kuantitatif. Sementara itu, penelitian Anugrah dan Syawaluddin lebih menekankan keterlibatan politik etnis Tionghoa melalui organisasi keagamaan PITI, sedangkan penelitian Rochana, Kartidjo, Irnawan serta Saputra dan Wijayati lebih banyak membahas Pecinan Semarang sebagai ruang sosial, budaya, ekonomi, dan historis. Dengan demikian, belum banyak kajian yang secara khusus membahas partisipasi politik masyarakat Tionghoa di Gang Pinggir dalam Pilkada Kota Semarang Tahun 2024.

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajian yang menghubungkan lokus Gang Pinggir sebagai bagian dari kawasan Pecinan Semarang dengan analisis partisipasi politik masyarakat Tionghoa dalam Pilkada Kota Semarang Tahun 2024. Penelitian ini tidak hanya melihat pilihan politik masyarakat, tetapi juga menelaah bentuk partisipasi, tingkat keterlibatan, serta faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi politik masyarakat. Dengan menggunakan teori partisipasi politik Milbrath dan Goel, penelitian ini berupaya menjelaskan apakah masyarakat Tionghoa di Gang Pinggir cenderung berada pada kategori apatis, spectators, atau gladiators, serta faktor pendorong dan penghambat yang membentuk partisipasi.

1.6 Kerangka Teori

1.6.1 Teori Partisipasi Politik Milbrath dan Goel

Pada hakikatnya, studi tentang partisipasi politik merupakan studi yang mempelajari bentuk keterlibatan masyarakat dalam kegiatan politik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Partisipasi politik dapat dipahami sebagai tindakan warga negara untuk ikut memengaruhi proses politik, menentukan pemimpin, serta menunjukkan sikap terhadap kehidupan pemerintahan. Dalam sistem demokrasi, partisipasi politik menjadi bagian penting karena masyarakat tidak hanya ditempatkan sebagai objek kebijakan, tetapi juga sebagai subjek yang memiliki hak untuk menentukan arah pemerintahan melalui mekanisme politik yang sah.

Partisipasi politik dalam penelitian ini dipahami sebagai keterlibatan masyarakat Tionghoa di Gang Pinggir dalam Pilkada Kota Semarang Tahun 2024. Keterlibatan tersebut tidak hanya dilihat dari kehadiran masyarakat di Tempat Pemungutan Suara, tetapi juga dari penggunaan hak pilih, perhatian terhadap informasi politik, komunikasi politik, serta keterlibatan dalam kegiatan politik lain yang berkaitan dengan proses pemilihan. Dengan demikian, partisipasi politik tidak hanya diartikan sebagai tindakan mencoblos, tetapi juga sebagai bentuk perhatian dan keterlibatan masyarakat terhadap proses demokrasi lokal.

Penelitian ini menggunakan teori partisipasi politik Milbrath dan Goel sebagai pisau analisis utama. Teori ini digunakan karena mampu menjelaskan partisipasi politik masyarakat melalui bentuk keterlibatan, tingkat partisipasi, serta faktor-faktor yang memengaruhi seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan

politik. Melalui teori ini, penulis dapat menganalisis apakah masyarakat Tionghoa di Gang Pinggir termasuk kelompok yang tidak terlibat dalam politik, hanya berpartisipasi sebagai pemilih, atau terlibat secara aktif dalam kegiatan politik.

Secara teoritis, Milbrath dan Goel menjelaskan bahwa partisipasi politik masyarakat dapat dilihat melalui beberapa aspek utama. Pertama, bentuk partisipasi politik masyarakat dalam proses pemilihan. Kedua, tingkat partisipasi politik yang menunjukkan intensitas keterlibatan masyarakat. Ketiga, faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi politik, baik yang bersifat mendorong maupun menghambat. Penulis akan menjabarkan aspek-aspek tersebut sebagai berikut.

a. Bentuk Partisipasi Politik

Bentuk partisipasi politik merupakan wujud nyata keterlibatan masyarakat dalam proses politik. Dalam konteks Pilkada, bentuk partisipasi politik dapat terlihat dari bagaimana masyarakat menggunakan hak politiknya, mengikuti informasi politik, membicarakan proses pemilihan, serta terlibat atau tidak terlibat dalam kegiatan politik yang lebih aktif. Bentuk partisipasi politik penting untuk dianalisis karena kehadiran masyarakat dalam Pilkada tidak selalu memiliki intensitas yang sama.

Dalam penelitian ini, bentuk partisipasi politik masyarakat Tionghoa di Gang Pinggir dilihat melalui beberapa indikator. Indikator pertama adalah kehadiran di Tempat Pemungutan Suara. Kehadiran di TPS menjadi bentuk partisipasi paling dasar karena menunjukkan bahwa masyarakat hadir secara langsung dalam proses pemungutan suara. Masyarakat yang datang ke TPS dapat dipahami sebagai warga yang masih memiliki keterlibatan dalam proses demokrasi lokal.

Indikator kedua adalah penggunaan hak pilih. Penggunaan hak pilih menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya hadir secara fisik di TPS, tetapi juga memberikan suara dalam Pilkada. Indikator ini penting karena hak pilih merupakan instrumen utama masyarakat dalam menentukan pemimpin daerah. Dalam konteks penelitian ini, penggunaan hak pilih masyarakat Tionghoa di Gang Pinggir menjadi dasar untuk melihat apakah mereka masih berpartisipasi dalam proses politik atau justru menarik diri dari proses pemilihan.

Indikator ketiga adalah perhatian terhadap informasi politik. Perhatian terhadap informasi politik dapat dilihat dari sejauh mana masyarakat mengikuti informasi mengenai calon, visi dan misi, program kerja, debat calon, kampanye, serta pemberitaan mengenai Pilkada. Indikator ini digunakan karena partisipasi politik tidak hanya berkaitan dengan tindakan memilih, tetapi juga dengan pengetahuan dan perhatian masyarakat terhadap proses politik yang sedang berlangsung.

Indikator keempat adalah komunikasi politik. Komunikasi politik dalam penelitian ini berkaitan dengan pembicaraan masyarakat mengenai Pilkada, calon, program, atau proses pemilihan di lingkungan keluarga, tetangga, tempat kerja, maupun komunitas sekitar. Komunikasi politik penting untuk dilihat karena dapat menunjukkan apakah Pilkada menjadi bagian dari pembicaraan sosial masyarakat atau hanya dipahami sebagai urusan pribadi masing-masing pemilih.

Indikator kelima adalah keterlibatan dalam kegiatan politik aktif. Bentuk keterlibatan ini dapat berupa mengikuti kampanye secara langsung, menjadi relawan, menjadi tim sukses, menjadi anggota organisasi politik, menjadi anggota

partai politik, atau mengajak orang lain untuk mendukung calon tertentu. Indikator ini digunakan untuk melihat apakah masyarakat Tionghoa di Gang Pinggir hanya berpartisipasi sebagai pemilih atau juga terlibat sebagai aktor politik yang aktif.

Berdasarkan beberapa indikator tersebut, bentuk partisipasi politik dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur keterlibatan masyarakat Tionghoa di Gang Pinggir dalam Pilkada Kota Semarang Tahun 2024. Dengan indikator tersebut, penulis dapat melihat apakah partisipasi masyarakat hanya bersifat elektoral atau sudah berkembang menjadi partisipasi yang lebih aktif dan terorganisasi.

b. Tingkat Partisipasi Politik

Selain melihat bentuk partisipasi politik, teori Milbrath dan Goel juga digunakan untuk melihat tingkat partisipasi politik masyarakat. Tingkat partisipasi politik menunjukkan sejauh mana intensitas keterlibatan masyarakat dalam proses politik. Tidak semua masyarakat yang menggunakan hak pilih dapat dikatakan aktif secara politik. Sebaliknya, masyarakat yang tidak terlibat dalam kampanye belum tentu dapat disebut apatis apabila mereka tetap hadir di TPS dan menggunakan hak pilih.

Milbrath dan Goel membagi masyarakat ke dalam tiga kategori tingkat partisipasi politik, yaitu apatis, spectators, dan gladiators. Pembagian ini menunjukkan bahwa partisipasi politik bersifat bertingkat. Ada masyarakat yang sama sekali tidak menunjukkan perhatian terhadap politik, ada yang hanya terlibat dalam kegiatan politik dasar, dan ada pula yang memiliki keterlibatan politik tinggi.

Kategori pertama adalah apatis. Apatitis merupakan kelompok masyarakat

yang tidak menunjukkan keterlibatan dalam proses politik. Dalam penelitian ini, masyarakat dapat dikategorikan apatis apabila tidak hadir di TPS, tidak menggunakan hak pilih, tidak mengikuti informasi politik, tidak membicarakan Pilkada, dan tidak menunjukkan ketertarikan terhadap proses pemilihan. Kategori ini menunjukkan tingkat partisipasi politik paling rendah karena masyarakat tidak terlibat dalam proses politik yang berlangsung.

Kategori kedua adalah spectators. Spectators merupakan kelompok masyarakat yang masih menunjukkan keterlibatan dalam politik, tetapi keterlibatannya terbatas. Dalam konteks penelitian ini, masyarakat dapat dikategorikan sebagai spectators apabila hadir di TPS, menggunakan hak pilih, mengikuti informasi politik secara terbatas, atau membicarakan Pilkada dalam lingkungan sosial tertentu, tetapi tidak terlibat dalam kampanye, organisasi politik, tim sukses, atau mobilisasi dukungan. Kategori ini penting karena masyarakat dalam kelompok spectators tidak dapat disebut apatis, tetapi juga belum dapat disebut sebagai aktor politik aktif.

Kategori ketiga adalah gladiators. Gladiators merupakan kelompok masyarakat yang memiliki keterlibatan politik tinggi. Masyarakat dalam kategori ini tidak hanya hadir dan menggunakan hak pilih, tetapi juga aktif dalam kegiatan politik yang lebih intensif. Bentuk keterlibatan tersebut dapat berupa mengikuti kampanye, menjadi relawan, menjadi tim sukses, menjadi anggota partai politik, aktif dalam organisasi politik, atau mengajak masyarakat lain untuk mendukung calon tertentu. Kelompok ini menunjukkan partisipasi politik yang lebih aktif dibandingkan kelompok spectators.

Dalam penelitian ini, kategori apatis, spectators, dan gladiators digunakan untuk membaca posisi partisipasi politik masyarakat Tionghoa di Gang Pinggir. Apabila masyarakat hanya hadir di TPS dan menggunakan hak pilih, tetapi tidak terlibat dalam kegiatan politik yang lebih aktif, maka partisipasi mereka lebih dekat dengan kategori spectators. Apabila terdapat masyarakat yang terlibat dalam kampanye, tim sukses, organisasi politik, atau mobilisasi dukungan, maka mereka dapat dikategorikan sebagai gladiators. Sebaliknya, apabila terdapat masyarakat yang tidak menggunakan hak pilih dan tidak menunjukkan perhatian terhadap Pilkada, maka mereka dapat dikategorikan sebagai apatis.

Dengan demikian, tingkat partisipasi politik dalam penelitian ini digunakan sebagai ukuran untuk melihat kedalaman keterlibatan masyarakat. Melalui kategori tersebut, penulis dapat menganalisis apakah masyarakat Tionghoa di Gang Pinggir cenderung pasif, terbatas sebagai pemilih, atau aktif dalam kegiatan politik.

c. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Partisipasi Politik

Partisipasi politik masyarakat tidak muncul dengan sendirinya, melainkan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Milbrath dan Goel menjelaskan bahwa partisipasi politik dapat dipengaruhi oleh penerimaan rangsangan politik, karakteristik pribadi, karakteristik sosial, dan situasi lingkungan politik. Dalam penelitian ini, keempat faktor tersebut digunakan untuk menganalisis hal-hal yang mendorong dan menghambat partisipasi politik masyarakat Tionghoa di Gang Pinggir.

Faktor pertama adalah penerimaan rangsangan politik. Penerimaan rangsangan politik berkaitan dengan informasi, ajakan, dorongan, atau pengaruh politik yang diterima masyarakat. Rangsangan politik dapat berasal dari media

sosial, televisi, berita daring, debat calon, kampanye, sosialisasi pemilu, maupun pembicaraan di lingkungan sekitar. Dalam konteks Pilkada, rangsangan politik dapat membantu masyarakat mengenal calon, memahami program, serta menentukan pilihan politik.

Penerimaan rangsangan politik dapat menjadi faktor pendorong apabila masyarakat memperoleh informasi yang cukup mengenai Pilkada, calon, visi-misi, program kerja, debat, dan tahapan pemilihan. Informasi yang cukup dapat membuat masyarakat lebih memahami proses pemilihan dan terdorong untuk menggunakan hak pilih. Sebaliknya, rangsangan politik dapat menjadi faktor penghambat apabila informasi yang diterima masyarakat terbatas, tidak mendalam, atau hanya diketahui secara umum. Kondisi tersebut dapat membuat partisipasi masyarakat berhenti pada tindakan memilih tanpa disertai pemahaman politik yang lebih kuat.

Faktor kedua adalah karakteristik pribadi. Karakteristik pribadi berkaitan dengan kondisi internal individu yang memengaruhi sikap dan keputusan politiknya. Faktor ini dapat berupa kesadaran politik, motivasi memilih, minat terhadap Pilkada, pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta pertimbangan rasional dalam menentukan pilihan. Dalam penelitian ini, karakteristik pribadi digunakan untuk melihat sejauh mana masyarakat Tionghoa di Gang Pinggir memiliki dorongan dari dalam diri untuk berpartisipasi dalam Pilkada.

Karakteristik pribadi dapat menjadi faktor pendorong apabila masyarakat memiliki kesadaran bahwa menggunakan hak pilih merupakan bagian dari tanggung jawab sebagai warga negara. Kesadaran tersebut dapat membuat

masyarakat tetap hadir di TPS dan menggunakan hak pilih meskipun tidak ada dorongan dari pihak lain. Selain itu, pertimbangan rasional terhadap calon, program, visi-misi, dan kemampuan kandidat juga dapat menjadi pendorong partisipasi. Sebaliknya, karakteristik pribadi dapat menjadi penghambat apabila masyarakat kurang memiliki minat terhadap politik, tidak mendalami informasi calon, atau menganggap Pilkada tidak terlalu berpengaruh terhadap kehidupan sehari-hari.

Faktor ketiga adalah karakteristik sosial. Karakteristik sosial berkaitan dengan lingkungan sosial yang melekat pada masyarakat. Faktor ini dapat berupa lingkungan keluarga, lingkungan tetangga, pekerjaan, aktivitas ekonomi, hubungan sosial, komunitas, serta identitas etnis. Dalam penelitian ini, karakteristik sosial menjadi penting karena masyarakat yang diteliti adalah masyarakat Tionghoa di Gang Pinggir, yaitu wilayah yang berada dalam kawasan Pecinan Semarang.

Karakteristik sosial dapat menjadi faktor pendorong apabila lingkungan keluarga, tetangga, komunitas, atau ruang sosial masyarakat mendukung keterlibatan politik. Diskusi politik dalam keluarga atau lingkungan sekitar dapat membuat masyarakat lebih memahami proses Pilkada dan terdorong untuk menggunakan hak pilih. Dalam konteks Gang Pinggir, karakteristik sosial juga berkaitan dengan kehidupan masyarakat Tionghoa yang memiliki hubungan historis, ekonomi, dan budaya dengan kawasan Pecinan. Akan tetapi, karakteristik sosial dapat menjadi penghambat apabila lingkungan masyarakat tidak membentuk ruang diskusi politik yang aktif, masyarakat lebih banyak berfokus pada aktivitas ekonomi, atau tidak terdapat dorongan kolektif untuk terlibat dalam kegiatan

politik.

Faktor keempat adalah situasi lingkungan politik. Situasi lingkungan politik berkaitan dengan kondisi politik yang melingkupi pelaksanaan Pilkada. Situasi tersebut dapat berupa keamanan TPS, ketertiban proses pemungutan suara, suasana politik lokal, kemudahan akses memilih, kepercayaan terhadap KPU dan Bawaslu, serta tidak adanya konflik atau tekanan politik. Lingkungan politik yang aman dan kondusif dapat membuat masyarakat merasa nyaman untuk menggunakan hak pilih.

Situasi lingkungan politik dapat menjadi faktor pendorong apabila pelaksanaan Pilkada berlangsung aman, tertib, dan dipercaya oleh masyarakat. Kepercayaan terhadap penyelenggara pemilu dapat memperkuat keyakinan masyarakat bahwa suara mereka dihitung secara sah dan proses pemilihan berjalan dengan baik. Sebaliknya, situasi lingkungan politik dapat menjadi faktor penghambat apabila terdapat konflik, tekanan politik, intimidasi, ketidakpercayaan terhadap penyelenggara pemilu, atau kendala administratif yang membuat masyarakat ragu untuk berpartisipasi.

Berdasarkan keempat faktor tersebut, penulis dapat menganalisis bahwa partisipasi politik masyarakat Tionghoa di Gang Pinggir tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor tunggal. Partisipasi politik terbentuk dari hubungan antara informasi politik yang diterima, kesadaran pribadi, lingkungan sosial masyarakat, dan situasi politik yang melingkupi pelaksanaan Pilkada. Faktor-faktor tersebut dapat menjadi pendorong apabila memperkuat keterlibatan masyarakat, tetapi juga dapat menjadi penghambat apabila membatasi masyarakat untuk terlibat lebih aktif.

1.7 Definisi Konsep

Definisi konsep digunakan untuk menjelaskan pengertian dan karakteristik konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian, dengan mengacu pada kerangka teori yang telah dirumuskan sebelumnya. Definisi konsep diperlukan agar pembahasan dalam penelitian ini memiliki batasan yang jelas dan tidak keluar dari fokus penelitian. Adapun definisi konsep dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1.7.1 Partisipasi Politik

Partisipasi politik adalah bentuk keterlibatan warga negara dalam kegiatan politik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam penelitian ini, partisipasi politik dimaknai sebagai keterlibatan masyarakat Tionghoa di Gang Pinggir dalam Pilkada Kota Semarang Tahun 2024. Partisipasi politik tersebut dapat dilihat melalui kehadiran masyarakat di Tempat Pemungutan Suara, penggunaan hak pilih, perhatian terhadap informasi politik, komunikasi politik di lingkungan sosial, serta keterlibatan dalam kegiatan politik lainnya yang berkaitan dengan Pilkada.

1.7.2 Bentuk Partisipasi Politik

Bentuk partisipasi politik adalah wujud keterlibatan masyarakat dalam proses politik. Dalam penelitian ini, bentuk partisipasi politik masyarakat Tionghoa di Gang Pinggir dilihat melalui beberapa indikator, yaitu hadir di TPS, menggunakan hak pilih, mengikuti informasi mengenai calon, memperhatikan visi, misi, program, debat atau kampanye, membicarakan Pilkada dengan keluarga atau lingkungan sekitar, serta terlibat atau tidak terlibat dalam kegiatan politik aktif seperti

kampanye, tim sukses, relawan, organisasi politik, atau mobilisasi dukungan.

1.7.3 Tingkat Partisipasi Politik

Tingkat partisipasi politik adalah ukuran untuk melihat sejauh mana intensitas keterlibatan masyarakat dalam kegiatan politik. Dalam penelitian ini, tingkat partisipasi politik mengacu pada teori Milbrath dan Goel yang membagi masyarakat ke dalam tiga kategori, yaitu apatis, spectators, dan gladiators. Apatis adalah masyarakat yang tidak menunjukkan keterlibatan dalam proses politik. Spectators adalah masyarakat yang masih berpartisipasi, terutama melalui penggunaan hak pilih, tetapi tidak terlibat secara aktif dalam kegiatan politik. Gladiators adalah masyarakat yang memiliki keterlibatan politik tinggi, seperti mengikuti kampanye, menjadi relawan, tim sukses, anggota organisasi politik, atau mengajak orang lain mendukung calon tertentu.

1.7.4 Penerimaan Rangsangan Politik

Penerimaan rangsangan politik adalah informasi, ajakan, dorongan, atau pengaruh politik yang diterima masyarakat sebelum dan selama proses Pilkada. Dalam penelitian ini, rangsangan politik dapat berasal dari media sosial, televisi, berita daring, baliho, debat calon, kampanye, sosialisasi pemilu, maupun pembicaraan di lingkungan sekitar. Konsep ini digunakan untuk melihat sejauh mana informasi politik memengaruhi perhatian dan keterlibatan masyarakat Tionghoa di Gang Pinggir dalam Pilkada Kota Semarang Tahun 2024.

1.7.5 Karakteristik Pribadi

Karakteristik pribadi adalah kondisi internal individu yang memengaruhi sikap dan keputusan politiknya. Dalam penelitian ini, karakteristik pribadi meliputi

kesadaran politik, motivasi menggunakan hak pilih, pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara, minat terhadap Pilkada, serta pertimbangan rasional dalam menentukan pilihan. Pertimbangan rasional tersebut dapat berupa penilaian terhadap visi, misi, program kerja, rekam jejak, kemampuan, dan kualitas calon.

1.7.6 Karakteristik Sosial

Karakteristik sosial adalah kondisi sosial yang melekat pada masyarakat dan dapat memengaruhi partisipasi politik. Dalam penelitian ini, karakteristik sosial meliputi lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, aktivitas ekonomi, hubungan sosial, identitas Tionghoa, serta posisi Gang Pinggir sebagai bagian dari kawasan Pecinan Semarang. Konsep ini digunakan untuk melihat apakah lingkungan sosial masyarakat mendorong atau justru membatasi keterlibatan politik masyarakat dalam Pilkada.

1.7.7 Situasi Lingkungan Politik

Situasi lingkungan politik adalah kondisi politik yang melingkupi pelaksanaan Pilkada. Dalam penelitian ini, situasi lingkungan politik meliputi keamanan pemungutan suara, ketertiban TPS, suasana politik lokal, kemudahan akses memilih, kepercayaan terhadap KPU dan Bawaslu, tidak adanya konflik, tidak adanya tekanan politik, serta tidak adanya hambatan administratif dalam menggunakan hak pilih. Konsep ini digunakan untuk melihat apakah kondisi pelaksanaan Pilkada yang aman dan kondusif mendorong masyarakat untuk hadir di TPS dan menggunakan hak pilih.

1.7.8 Faktor Pendorong dan Penghambat Partisipasi Politik

Faktor pendorong partisipasi politik adalah hal-hal yang membuat masyarakat terdorong untuk terlibat dalam Pilkada. Faktor tersebut dapat berupa adanya informasi politik, kesadaran menggunakan hak pilih, pertimbangan rasional terhadap calon, lingkungan sosial yang mendukung, serta situasi Pilkada yang aman dan tertib. Sementara itu, faktor penghambat partisipasi politik adalah hal-hal yang membatasi keterlibatan masyarakat, seperti informasi politik yang terbatas, rendahnya minat politik, rendahnya diskusi politik di lingkungan sosial, tidak adanya mobilisasi kolektif, kesibukan aktivitas ekonomi, atau kurangnya pendalaman terhadap program calon.

1.8 Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan petunjuk pelaksanaan untuk mengukur konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian. Berdasarkan definisi konsep yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini menggunakan beberapa indikator untuk melihat partisipasi politik masyarakat Tionghoa di Gang Pinggir dalam Pilkada Kota Semarang Tahun 2024. Adapun indikator operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1.8.1 Partisipasi Politik Masyarakat Tionghoa dalam Pilkada Kota Semarang Tahun 2024

1. Hadir atau tidak hadir di Tempat Pemungutan Suara pada saat Pilkada Kota Semarang Tahun 2024.
2. Menggunakan atau tidak menggunakan hak pilih dalam Pilkada Kota Semarang Tahun 2024.

3. Mengetahui pasangan calon yang mengikuti Pilkada Kota Semarang Tahun 2024.
4. Mengetahui visi, misi, program kerja, atau rekam jejak calon kepala daerah.
5. Mengikuti informasi mengenai Pilkada melalui media sosial, televisi, berita daring, baliho, kampanye, debat calon, atau sosialisasi pemilu.
6. Membicarakan Pilkada dengan keluarga, tetangga, teman, atau lingkungan sekitar.
7. Memiliki alasan tertentu dalam menggunakan hak pilih, seperti kesadaran pribadi, tanggung jawab sebagai warga negara, pilihan terhadap program calon, atau pertimbangan terhadap kualitas calon.
8. Mengikuti atau tidak mengikuti kegiatan kampanye pasangan calon.
9. Menjadi atau tidak menjadi relawan, tim sukses, anggota partai politik, atau bagian dari organisasi politik tertentu.
10. Mengajak atau tidak mengajak orang lain untuk memilih calon tertentu.
11. Mempertimbangkan faktor identitas etnis, gender, agama, atau latar belakang calon dalam menentukan pilihan politik.
12. Mempertimbangkan kemampuan, program, visi-misi, rekam jejak, dan kualitas calon dalam menentukan pilihan politik.

1.8.2 Tingkat Partisipasi Politik

1. Apatis, yaitu masyarakat yang tidak hadir di TPS, tidak menggunakan hak pilih, tidak mengikuti informasi politik, tidak membicarakan Pilkada, dan

tidak menunjukkan ketertarikan terhadap proses pemilihan.

2. Spectators, yaitu masyarakat yang hadir di TPS, menggunakan hak pilih, mengetahui informasi umum tentang Pilkada, tetapi tidak terlibat dalam kampanye, organisasi politik, tim sukses, relawan, atau mobilisasi dukungan.
3. Gladiators, yaitu masyarakat yang tidak hanya menggunakan hak pilih, tetapi juga aktif dalam kegiatan politik, seperti mengikuti kampanye, menjadi relawan, menjadi tim sukses, menjadi anggota partai politik, bergabung dalam organisasi politik, atau mengajak orang lain untuk mendukung calon tertentu.

1.8.3 Partisipasi Politik Masyarakat Tionghoa dalam Pilkada Kota Semarang Tahun 2024

1. Penerimaan rangsangan politik, yaitu adanya informasi, ajakan, atau dorongan politik yang diterima masyarakat melalui media sosial, televisi, berita daring, baliho, debat calon, kampanye, sosialisasi pemilu, atau pembicaraan di lingkungan sekitar.
2. Karakteristik pribadi, yaitu kesadaran politik, motivasi memilih, pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara, minat terhadap Pilkada, serta pertimbangan rasional dalam memilih calon.
3. Karakteristik sosial, yaitu pengaruh keluarga, tetangga, komunitas, pekerjaan, aktivitas ekonomi, hubungan sosial, identitas Tionghoa, serta posisi Gang Pinggir sebagai bagian dari kawasan Pecinan Semarang.

4. Situasi lingkungan politik, yaitu keamanan TPS, ketertiban pemungutan suara, suasana politik yang kondusif, kemudahan akses memilih, kepercayaan terhadap KPU dan Bawaslu, tidak adanya konflik, tidak adanya tekanan politik, serta tidak adanya hambatan administratif dalam menggunakan hak pilih.

1.8.4 Partisipasi Politik Masyarakat Tionghoa dalam Pilkada Kota Semarang Tahun 2024

1. Faktor pendorong partisipasi politik meliputi adanya informasi politik yang cukup, kesadaran menggunakan hak pilih, tanggung jawab sebagai warga negara, pertimbangan rasional terhadap calon, lingkungan sosial yang mendukung, serta situasi Pilkada yang aman dan tertib.
2. Faktor penghambat partisipasi politik meliputi informasi politik yang terbatas, rendahnya minat terhadap politik, rendahnya diskusi politik di lingkungan sosial, tidak adanya mobilisasi kolektif, kesibukan dalam aktivitas ekonomi, kurangnya pendalaman terhadap program calon, atau hambatan administratif dalam proses pemilihan.

1.9 Kerangka Berpikir

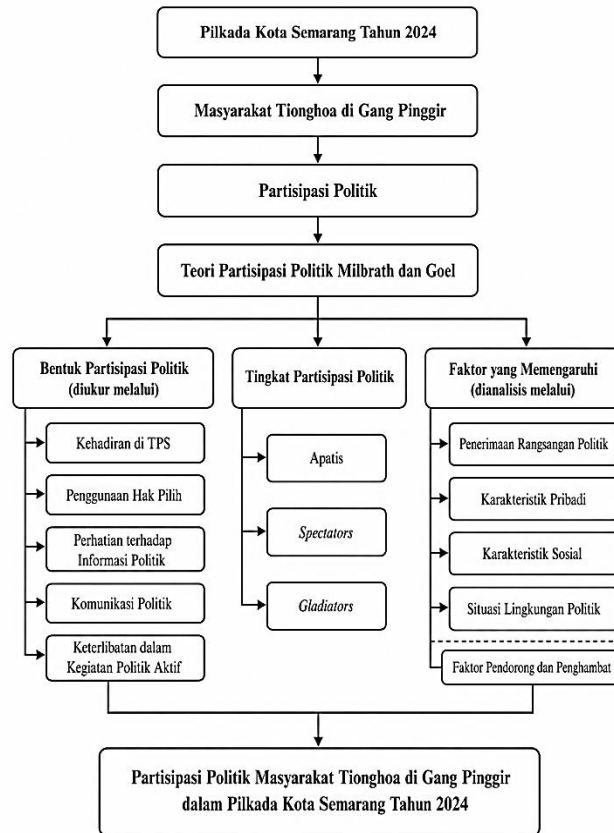
Kerangka berpikir dalam penelitian ini disusun untuk menjelaskan alur analisis mengenai partisipasi politik masyarakat Tionghoa di Gang Pinggir dalam Pilkada Kota Semarang Tahun 2024. Penelitian ini berangkat dari pelaksanaan Pilkada Kota Semarang Tahun 2024 sebagai bagian dari proses demokrasi lokal yang memberikan ruang kepada masyarakat untuk menggunakan hak politiknya. Dalam konteks tersebut, masyarakat Tionghoa di Gang Pinggir menjadi subjek

penelitian karena wilayah ini merupakan bagian dari kawasan Pecinan Semarang yang memiliki karakter sosial, historis, ekonomi, dan identitas yang khas.

Penelitian ini menggunakan teori partisipasi politik Milbrath dan Goel sebagai pisau analisis utama. Teori tersebut digunakan untuk melihat bentuk partisipasi politik, tingkat partisipasi politik, serta faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi masyarakat. Bentuk partisipasi politik dilihat melalui kehadiran di TPS, penggunaan hak pilih, perhatian terhadap informasi politik, komunikasi politik, dan keterlibatan dalam kegiatan politik aktif.

Selanjutnya, tingkat partisipasi politik masyarakat dianalisis melalui kategori apatis, spectators, dan gladiators. Kategori tersebut digunakan untuk mengetahui apakah masyarakat Tionghoa di Gang Pinggir tidak terlibat dalam politik, hanya berpartisipasi sebagai pemilih, atau terlibat secara aktif dalam kegiatan politik. Sementara itu, faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi dianalisis melalui penerimaan rangsangan politik, karakteristik pribadi, karakteristik sosial, dan situasi lingkungan politik.

Gambar 1.1 Kerangka Berpikir



1.10 Metode Penelitian

Untuk memahami partisipasi politik masyarakat Tionghoa di Gang Pinggir dalam Pilkada Kota Semarang Tahun 2024, penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Metode ini dipilih karena penelitian tidak hanya bertujuan untuk mengetahui angka partisipasi pemilih, tetapi juga untuk memahami bentuk keterlibatan masyarakat, alasan menggunakan hak pilih, perhatian terhadap informasi politik, komunikasi politik, serta faktor-faktor yang mendorong dan menghambat partisipasi politik masyarakat.

Fokus penelitian ini berada pada pengalaman dan pandangan masyarakat Tionghoa di Gang Pinggir sebagai pemilih dalam Pilkada Kota Semarang Tahun 2024. Oleh karena itu, pendekatan kualitatif dianggap tepat karena mampu

menggali data secara lebih mendalam melalui keterangan informan, bukan hanya melalui data statistik. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memahami bagaimana masyarakat memaknai Pilkada, bagaimana mereka menentukan sikap politik, serta bagaimana lingkungan sosial, informasi politik, dan situasi pelaksanaan pemilihan memengaruhi keterlibatan mereka.

Penelitian ini bersifat deskriptif karena berusaha menggambarkan secara sistematis partisipasi politik masyarakat Tionghoa di Gang Pinggir berdasarkan data lapangan. Deskripsi tersebut tidak hanya berhenti pada penjelasan mengenai hadir atau tidaknya masyarakat di TPS, tetapi juga diarahkan untuk menjelaskan bentuk partisipasi politik dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Dengan demikian, data partisipasi pemilih digunakan sebagai konteks awal, sedangkan analisis utama penelitian diarahkan pada pemahaman terhadap perilaku dan keterlibatan politik masyarakat.

Pemilihan metode kualitatif juga didasarkan pada karakter penelitian yang membutuhkan penjelasan mengenai konteks sosial masyarakat. Gang Pinggir merupakan bagian dari kawasan Pecinan Semarang yang memiliki latar sosial, historis, ekonomi, dan budaya yang khas. Karena itu, partisipasi politik masyarakat Tionghoa di wilayah ini tidak cukup dijelaskan melalui angka partisipasi saja, tetapi perlu dipahami melalui wawancara, dokumentasi, dan interpretasi terhadap kondisi sosial-politik yang melingkupinya.

Dengan metode kualitatif deskriptif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai partisipasi politik masyarakat Tionghoa di Gang Pinggir. Penelitian ini berfokus pada dua hal utama, yaitu bentuk

partisipasi politik masyarakat Tionghoa dalam Pilkada Kota Semarang Tahun 2024 dan faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi tersebut.

1.10.1 Tipe Penelitian

Fokus utama penelitian ini adalah menggambarkan realitas sosial secara mendalam dan kontekstual, maka pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Beberapa ciri dan teknik dalam desain *Qualitative Description* (QD) telah banyak dibahas dalam literatur. Secara umum, pendekatan ini berpijak pada pandangan naturalistik, di mana fenomena diteliti dalam keadaan alaminya. *QD* juga dikenal lebih fleksibel dan tidak terlalu terikat pada teori tertentu, sehingga peneliti bebas memilih apakah akan menggunakan kerangka teori sejak awal atau menyesuaikannya sepanjang proses penelitian. Pengumpulan data biasanya dilakukan melalui wawancara individu atau kelompok dengan panduan wawancara yang bersifat minimal hingga semi-terstruktur. Teknik *purposeful sampling* seperti *maximum variation sampling* sering digunakan untuk memperoleh informasi yang beragam dan kaya. Untuk analisis data, *content analysis* menjadi strategi utama, kadang dilengkapi dengan data kuantitatif deskriptif, dan bisa juga menggunakan *thematic analysis* dengan catatan tidak disamakan dengan *content analysis*. Pendekatan ini memungkinkan peneliti tetap dekat dengan data dan menghasilkan interpretasi yang bersifat *low-inference*, sehingga temuan cenderung konsisten meskipun disampaikan dengan cara berbeda. Hasil penelitian biasanya disajikan secara langsung, deskriptif, dan mudah dipahami pembaca.

1.10.2 Situs Penelitian

Untuk memahami partisipasi politik masyarakat Tionghoa di Gang Pinggir yang menjadi fokus penelitian ini, maka penting untuk mengetahui karakteristik kawasan Gang Pinggir terlebih dahulu. *Chinatown* merupakan kawasan permukiman komunitas etnis Tionghoa yang telah lama menjadi bagian dari area konservasi di Semarang. Lokasinya sangat strategis karena berada di pusat bisnis kota, sehingga kegiatan utama di wilayah ini didominasi oleh perdagangan dan jasa. Di sepanjang Gang Pinggir, banyak masyarakat Tionghoa yang memanfaatkan rumah mereka sebagai tempat usaha, yang dikenal dengan sebutan *shophouse*. Jenis usaha yang umum ditemui meliputi perdagangan sembako, emas, kerajinan, serta dekorasi khas Tionghoa. *Shophouse* ini umumnya berfungsi ganda sebagai tempat tinggal sekaligus tempat berdagang.

1.10.3 Subjek Penelitian

Subjek utama dalam penelitian ini adalah masyarakat Tionghoa yang berdomisili atau beraktivitas di Gang Pinggir, Kelurahan Kranggan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang. Masyarakat Tionghoa dipilih sebagai subjek penelitian karena memiliki keterkaitan langsung dengan fokus penelitian, yaitu partisipasi politik kelompok etnis minoritas dalam Pilkada Kota Semarang Tahun 2024. Selain masyarakat Tionghoa, penelitian ini juga melibatkan tokoh masyarakat dan penyelenggara pemilu sebagai narasumber pendukung. Pemilihan narasumber tersebut dilakukan untuk memperoleh data yang lebih lengkap mengenai bentuk partisipasi, faktor yang memengaruhi partisipasi, serta konteks sosial-politik masyarakat Tionghoa di Gang Pinggir.

1.10.4 Jenis data

Pengumpulan data dapat dilakukan melalui dua sumber, yaitu *primary source* dan *secondary source*. *Primary data* merupakan data asli dan faktual yang dikumpulkan langsung oleh peneliti untuk menjawab permasalahan tertentu, biasanya melalui survei, observasi, dan wawancara. Sementara itu, *secondary data* adalah data yang sudah dikumpulkan oleh pihak lain sebelumnya, seperti dari publikasi pemerintah, buku, artikel jurnal, atau situs web, dan biasanya digunakan untuk keperluan yang berbeda dari masalah yang sedang diteliti. Perbedaan mendasarnya terletak pada keaslian dan tujuan pengumpulan. *Primary data* bersifat *real-time* dan spesifik terhadap masalah penelitian, sedangkan *secondary data* merupakan hasil analisis atau interpretasi atas data yang telah ada, sehingga lebih cepat dan mudah diakses namun tidak selalu relevan langsung terhadap isu yang diteliti.

1.10.5 Sumber Data

Penelitian ini memanfaatkan beragam sumber data yang relevan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai partisipasi politik masyarakat Tionghoa di Gang Pinggir dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Semarang tahun 2024. Sumber data utama berasal dari warga Tionghoa yang berdomisili di Gang Pinggir sebagai subjek utama penelitian, guna menangkap pengalaman, pandangan, serta motivasi mereka dalam berpartisipasi dalam proses politik lokal. Selain itu, tokoh masyarakat seperti Ketua RT di lingkungan tersebut turut dijadikan narasumber untuk memberikan perspektif sosial dan budaya yang memengaruhi keterlibatan politik warga. Peneliti juga melibatkan

penyelenggara pemilu, baik dari KPU Kota Semarang dan Bawaslu Kota Semarang, untuk memperoleh data dan informasi teknis mengenai partisipasi pemilih serta kebijakan penyelenggaraan pemilu.

1.10.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam upaya memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai partisipasi politik masyarakat Tionghoa di Gang Pinggir, penelitian ini mengandalkan pendekatan kualitatif yang menitikberatkan pada penggalian makna di balik perilaku dan pandangan individu. Oleh karena itu, proses pengumpulan data menjadi aspek krusial yang tidak hanya menentukan kedalaman informasi, tetapi juga keakuratan interpretasi yang dihasilkan. Penelitian ini menggunakan dua metode utama dalam pengumpulan data, yaitu wawancara dan studi literatur, yang masing-masing memiliki peran penting dalam membangun landasan empiris dan teoritis dari kajian ini.

Penelitian kualitatif menggunakan data non-numerik dan berfokus pada kualitas serta makna tindakan seseorang, termasuk hubungan antara tindakan dan keyakinannya. Salah satu kekuatan utama dari pendekatan kualitatif adalah kemampuannya dalam membentuk hipotesis melalui data naratif, terutama dari wawancara yang dinilai lebih mendalam dibanding kuesioner. Wawancara memungkinkan informan menyampaikan pandangannya secara langsung dan ekspresif, serta membantu peneliti memahami makna sosial yang dibangun dalam konteks alami. Pembahasan ini diharapkan dapat memperkaya penelitian penulis di masa depan dalam menggunakan dan menganalisis wawancara secara tepat.

Kajian pustaka dalam penelitian dapat dibagi menjadi studi primer (penelitian baru pada topik tertentu) dan studi sekunder (yang merangkum atau mensintesis kondisi terkini dari penelitian pada topik tersebut). Studi sekunder penting untuk mengidentifikasi celah penelitian atau topik yang masih kurang mendapat perhatian. Untuk melakukannya, dibutuhkan pencarian literatur yang menyeluruh di berbagai basis data.

1.10.7 Analisis dan Interpretasi Data

Agar mendapat gambaran yang komprehensif tentang partisipasi politik masyarakat Tionghoa di Gang Pinggir, penelitian ini menggunakan pendekatan analisis data kualitatif deskriptif. Melalui metode ini, peneliti dapat menganalisis mendalam cerita, pengalaman, dan pandangan para narasumber yang didapat dari hasil wawancara dan kajian literatur, lalu mengolahnya jadi pemahaman yang lebih mendalam.

Data adalah informasi faktual seperti angka, karakter, atau gambar yang dapat dianalisis untuk membantu pengambilan keputusan. Data sendiri tidak memiliki makna hingga diinterpretasikan menjadi informasi yang berguna. Proses analisis data melibatkan pengolahan data mentah menjadi fakta yang bisa dipahami, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, dengan tujuan menemukan pola, hubungan, atau memprediksi hasil. Analisis ini mencakup langkah- langkah seperti pengkodean, klasifikasi, tabulasi, serta penerapan logika dan metode statistik untuk memahami data secara mendalam.

Data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk narasi atau kata- kata, bukan angka. Data ini biasanya dikumpulkan melalui wawancara, diskusi

kelompok, atau situasi yang tidak terlalu terstruktur. Analisis data kualitatif bertujuan untuk mengklasifikasikan dan menafsirkan materi berbahasa (atau visual) guna memahami makna yang terkandung, baik yang tersirat maupun yang tersurat. Proses ini membantu menggambarkan atau menafsirkan data dari berbagai dimensi makna, baik yang bersifat subjektif maupun sosial. Dengan pendekatan interpretatif, analisis ini mengubah data yang telah dikumpulkan menjadi pemahaman atau penjelasan tentang individu maupun situasi yang diteliti, melalui isi simbolik dan bermakna dari informasi seperti transkrip wawancara, catatan lapangan, rekaman video dan audio, gambar, maupun dokumen teks.

1.10.8 Kualitas Data (Goodness Criteria)

Dalam penelitian ini peneliti tidak hanya berfokus pada perolehan data, tetapi juga pada bagaimana kualitas data tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Karena penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, maka penilaian terhadap mutu data yang dikumpulkan tidak bisa disamakan dengan pendekatan kuantitatif yang lebih menekankan pada validitas numerik atau statistik. Pendekatan kualitatif menekankan pada kedalaman pemahaman terhadap fenomena sosial yang kompleks, sehingga standar penilaiannya pun berbeda, tergantung pada paradigma yang melandasi penelitian. Dengan kata lain, untuk memastikan bahwa hasil penelitian ini tidak hanya relevan secara teoritis tetapi juga bermakna secara kontekstual, peneliti perlu memahami dan menerapkan kriteria-kriteria kualitas yang sesuai dengan pendekatan kualitatif. Sehubungan dengan itu, berikut disampaikan pandangan para ahli mengenai penilaian kualitas dalam penelitian kualitatif.

Menilai kualitas penelitian kualitatif tidak bisa disamakan dengan penelitian kuantitatif karena pendekatannya berbeda-beda, tergantung pada cara pandang atau paradigma yang digunakan, seperti positivist, constructivist, critical, dan feminist poststructural. Karena itu, tidak ada satu standar yang berlaku untuk semua. Penelitian kualitatif yang baik biasanya dilihat dari seberapa relevan, bermakna, etis, dan tepat sasaran topik yang diangkat. Beberapa peneliti sudah membuat panduan dan pertanyaan-pertanyaan penting untuk membantu menilai kualitas penelitian, seperti *Consolidated Criteria for Reporting Qualitative Research (COREQ)*, *Standards for Reporting Qualitative Research (SRQR)*, *Critical Appraisal Skills Programme (CASP)*, dan *checklist* lain yang cocok juga untuk peneliti pemula. Supaya penelitian berkualitas, peneliti perlu memastikan masalah dan tujuan penelitian jelas, kerangka berpikirnya kuat, serta latar permasalahannya dijelaskan dengan baik. Selain itu, meskipun penelitian kualitatif tidak fokus pada hasil yang bisa digeneralisasi seperti penelitian kuantitatif, tetap penting untuk menunjukkan bagaimana temuan bisa dipahami dan berguna dalam situasi atau latar yang lebih luas.